

HUBUNGAN PERILAKU POLITIK UANG DENGAN PARTISIPASI PEMILIH

Bayu Syafriza, Rodi Wahyudi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: <i>money politics</i> <i>voter participation</i> <i>regional heads election</i></p>	<p><i>The purpose of writing this article is to find out the relationship between money politics behavior and voter participation in the 2020 Pilkada in Asam Jawa Village, South Labuhanbatu Regency. This research method uses a quantitative method by distributing questionnaires to 97 respondents who voted in the 2020 Pilkada. The data was analyzed using the product moment correlation test with SPSS version 22 software. The results showed that there was no significant relationship between money politics behavior and voter participation ($r=0.463$, where $p>0.05$). Although the success team of 5 regional head candidates tried to influence the people's choices through the practice of distributing money/goods, it did not affect citizen participation in the 2020 Pilkada. The level of political awareness of the villagers was quite good, as evidenced by the 73.57% attendance rate at TPS when the election took place.</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p>Kata Kunci: <i>Politik uang</i> <i>Partisipasi pemilih</i> <i>Pemilihan kepala daerah</i></p> <hr/> <p>Corresponding Author: bayusyafri200@gmail.com</p>	<p>Tujuan penulisan artikel adalah mengetahui hubungan perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020 di Desa Asam Jawa Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada 97 responden yang ikut memilih pada pilkada tahun 2020. Data dianalisis dengan menggunakan uji korelasi <i>product moment</i> dengan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih ($r=0,463$, dimana $p>0,05$). Walaupun tim sukses dari 5 calon kepala daerah berusaha mempengaruhi pilihan warga melalui praktek pembagian uang/barang ternyata tidak mempengaruhi partisipasi warga dalam Pilkada Tahun 2020. Tingkat kesadaran politik warga desa sudah cukup baik dibuktikan dengan tingkat kehadiran 73,57% di TPS saat pemilihan berlangsung.</p>

PENDAHULUAN

Melalui sistem pemilu/pilkada bahwa yang berkuasa bergantung kepada suara mayoritas rakyat. Usaha mendapat suara terbanyak dari rakyat, maka dilakukanlah berbagai strategi oleh partai pendukung, tim konsultan, tim pemenangan, tim buzzer, tim relawan bahkan tim supranatural mulai dari cara yang dibenarkan oleh undang-undang sampai cara yang menyalahi undang-undang. Menurut Burhanudin Muhtadi (2019) bahwa kisaran politik uang di Indonesia termasuk kategori sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia. Politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu. Sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang karena calon dipaksa bertarung antar sesama calon dalam satu partai untuk mengejar *personal vote*.

Perilaku politik uang bukanlah isu baru dalam kajian perilaku pemilih karena telah diteliti oleh para peneliti perilaku pemilih. Dari beberapa kajian sebelumnya ada yang berpendapat bahwa hubungannya kuat dan signifikan. Ada pula yang berpendapat hubungannya signifikan tetapi lemah dan ada peneliti yang berpendapat tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya, Reynaldo Sinabariba (2019) menyatakan bahwa hubungan politik uang dengan partisipasi pemilih memiliki korelasi yang negatif lemah. Berbeda dengan hasil kajian Mery Anggraini (2018) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada pilkada serentak tahun 2015 dipengaruhi oleh faktor status sosial ekonomi, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan politik uang. Kajian yang mirip dengan Mery Anggraini telah dilakukan oleh Mohammad Ashif Fuadi (2014) tentang hubungan tokoh agama dan politik uang yang berpendapat bahwa politik uang memiliki hubungan yang signifikan walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar.

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi.

Pemilihan kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen) dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pilkada juga dilaksanakan secara langsung oleh penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk bisa memilih salah satu kandidat pasangan calon. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih tersebut akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Kondisi yang memilukan hati adalah apabila politik uang melibatkan penyelenggara pilkada. Sebaiknya mereka netral dan tidak memihak kepada partai dan calon manapun. Sebagaimana telah terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang memeriksa empat penyelenggara pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten serta Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mereka dituduh telah melakukan perbuatan yang merugikan proses demokrasi lantaran menjadi partisan dari salah satu bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati yaitu menerima dan membagi-bagikan uang kepada bawahannya untuk memuluskan Bapaslon tersebut (dkpp.go.id, 8 September 2020).

Adapun indikasi *Money politics* yang peneliti temukan dari berbagai sumber di lokasi penelitian bahwa ada yang menggunakan uang dengan jumlah sebesar Rp 100.000-150.000 per-kepala yang di bagikan pada saat malam hari sebelum besok pelaksanaan Pilkada, ada juga yang memberikan janji berupa kartu jaminan, yang apabila paslon tersebut terpilih akan ada uang yang diberi bagi siapa saja yang mendapatkan kartu yang tadinya di bagikan saat musyawarah besar (perkumpulan besar) yang diadakan di pasar minggu Desa Asam Jawa Dusun Sumberjo.

Tabel 1. Pasangan Calon, Partai Pengusung, Hasil Perolehan Suara dan Persentase Suara Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

No.	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Hasil Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, ST, MM dan Husni Rizal, SP	Independen	8.108	5,2%
2.	H. Edimin dan H. Ahmad Fadli Tanjung, S.Ag	PDIP dan PKP	65.936	42,5%
3.	Hj. Hasnah HRP. S.E dan Drs. Kholil Jufri. MM	Nasdem, hanura, PKB, PPP, PAN, Perindo, Golkar, PKS, Gerindra	62.411	42,1%
4.	H. Mangayat Jago Ritonga dan Jon Abidin ritonga	Independen	11.049	7,1%
5.	Drs. H. Maslin Pulungan MM dan Fery Andika Dalimunthe, S. Kom., MM	Independen	4.689	3.0%

Sumber: KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 5 pasang calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada tahun 2020 yang lalu. Terdapat 3 pasang calon yang maju melalui jalur independen dan 2 pasang calon yang maju menggunakan perahu partai politik. Terdapat selisih suara hanya 3.525 antara pasangan nomor urut 2 dengan nomor urut 3.

Tabel 2 dibawah menunjukkan bahwa total DPT (Daftar Pemilih Tetap) Desa Asam Jawa berdasarkan asal dusun tahun 2020 sebanyak 12.305 suara dan tingkat kehadiran di TPS sebanyak 9.289 suara (73,57%). Dusun Teluk pinang merupakan dusun dengan tingkat kehadiran yang paling tinggi yaitu 86,43% dan Aek batu milano sebesar 80,67%. Sedangkan dusun dengan tingkat kehadiran paling rendah adalah Sumberjo V sebesar 40,66%. Walaupun persentase kehadiran warga pada pilkada di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 yang lalu lebih rendah daripada angka partisipasi pemilu secara nasional yaitu sebesar 81 %, namun angka 73,57% merupakan tingkat kehadiran yang menggambarkan kesadaran politik warga Desa Asam Jawa cukup baik.

Tabel 2. Data DPT Per-Dusun dan Tingkat Kehadiran di TPS Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pilkada Tahun 2020

No	Nama Dusun di Desa Asam Jawa	Jumlah DPT Per-Dusun	Tingkat Kehadiran di TPS	Jumlah Persentase
1	Aek batu al 'amin	613	423	69,00%
2	Aek batu bakti	323	252	78,01%
3	Aek batu milano	295	238	80,67%
4	Aek batu selatan	463	362	78,18%
5	Aek batu timur	490	332	67,75%
6	Aek batu utara	1.072	764	71,26%
7	Aek torop barat	704	544	77,27%
8	Aek torop timur	429	365	85,08%
9	Asam jawa barat	750	571	76,13%
10	Asam jawa timur	794	630	79,34%
11	Cinta makmur	603	323	53,56%
12	Herfinta	294	220	74,82%
13	Kampung beringin	230	154	66,95%
14	Kampung mangga	657	466	70,92%
15	Sumberjo I	874	664	75,97%

16	Sumberjo II	646	511	79,10%
17	Sumberjo III	692	495	71,53%
18	Sumberjo IV	236	172	72,88%
19	Sumberjo V	423	172	40,66%
20	Sumberjo pirbun	423	336	79,43%
21	Tasik rejo	432	276	63,88%
22	Teluk pinang	457	395	86,43%
Jumlah		12.305	9.053	73,57%

Sumber: KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2021

Fokus kajian ini adalah budaya politik lokal ditingkat bawah. Kajian ini mencoba untuk menemukan jawaban mengenai hubungan perilaku politik uang dengan partisipasi meneliti tentang hubungan politik uang dengan partisipasi masyarakat, dengan meneliti di beberapa dusun yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tertinggi, dan apakah dengan tingkat partisipasi masyarakat tinggi ada hubungannya dengan perilaku politik uang didalamnya, atau sukarela karna sebagai memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan cara membagikan angket kepada 97 responden yang ikut memilih pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. Data dianalisis dengan menggunakan uji korelasi product moment dengan software SPSS versi 22. Terdapat dua variable dalam penelitian yaitu perilaku politik uang (variabel bebas) yang telah diukur dengan 14 item dan partisipasi pemilih (variabel terikat) telah diukur dengan 9 item.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 dibawah menunjukkan demografi responden penelitian yang berasal dari masyarakat di enam dusun dengan partisipasi pemilih terbanyak di Desa Asam Jawa sebanyak 97 orang responden. Responden diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pekerjaan, jenis kelamin, agama dan umur. Responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 61 responden (62,9%) dan sebanyak 36 responden perempuan (37,1%). Mengikuti pekerjaan, responden yang bekerja sebagai PNS hanya 1 (1,0%), pegawai swasta sebanyak 15 responden (15,5%), petani sebanyak 30 responden (30,9%), ibu rumah tangga sebanyak 17 responden (17,5%) dan mahasiswa/pelajar sebanyak 7 responden (7,2%). Responden yang beragama Islam sebanyak 95 responden (97,9%) dan non muslim hanya 2 orang (2,1%). Responden yang berumur kurang dari 25 tahun sebanyak 7 responden (7,2%), umur 25-35 tahun sebanyak 3 responden (3,1%), umur 46-55 tahun sebanyak 39 responden (40,2%) dan umur lebih dari 55 tahun sebanyak 32 responden (33,0%).

Tabel 3. Demografi Responden Penelitian

Demografi Responden		Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-Laki	61	62,9
	Perempuan	36	37,1
Pekerjaan	ASN	1	1,0
	Wiraswasta	15	15,5
	Petani	30	30,9
	Buruh	8	8,2
	Pedagang	18	18,6
	Ibu Rumah Tangga	17	17,5
	Pelajar/Mahasiswa	7	7,2
Agama	Islam	95	97,9
	Non Muslim	2	2,1
Umur	Kurang dari 25 Tahun	7	7,2

	25-35 tahun	3	3,1
	36-45 tahun	10	10,3
	46-55 tahun	39	40,2
	56 tahun ke atas	32	33,0
Jumlah		97	100,0

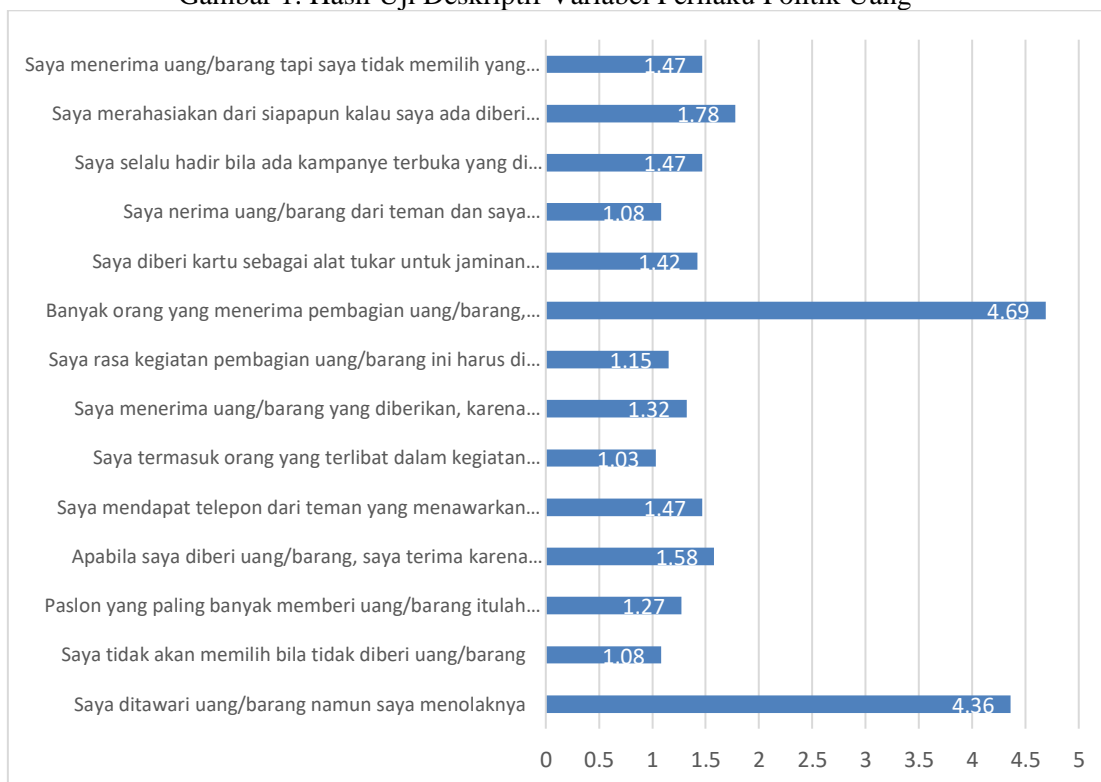
Sumber: Data Diolah dari SPSS.

Gambar 1 menunjukkan hasil deskriptif variable perilaku politik uang yang terdiri dari 14 item pernyataan dengan pilihan jawaban tidak pernah (skor 1), jarang (skor 2), kadang-kadang (skor 3), sering (skor 4) dan selalu (skor 5). Terdapat dua item yang memiliki skor paling tinggi yaitu *Banyak orang yang menerima pembagian uang/barang, karena sudah dianggap sebagai budaya masyarakat di masa pilkada* (mean=4,69) dan *Saya ditawari uang/barang namun saya menolaknya* (mean=4,36).

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa membagikan uang/barang sudah dianggap sebagai budaya pilkada. Perilaku sosial yang dilakukan oleh seseorang bukanlah budaya. Tetapi perilaku yang dilakukan oleh mayoritas warga (sekalipun buruk) namun dianggap tidak melanggar aturan, norma dan nilai masyarakat sehingga dianggap benar dan terjadi berulang-ulang pada waktu yang berbeda maka bisa dianggap sebagai budaya. Kajian ini mendukung pendapat Affan Gaffar (2005) mengenai budaya politik local di Indonesia yaitu pola *patron-client*. Budaya politik patronage ini bersifat individual, yakni antara si *patron* dan si *client*, majikan dan pembantu, atasan dan bawahan. Antara keduanya terjadi interaksi yang bersifat timbal balik dengan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, dukungan, materi, dan loyalitas. Calon kepala daerah Bersama tim pemenangannya sebagai si *patron* membagikan uang, barang, baju dan souvenir kepada si *client*.

Membahas mengenai budaya politik, Aos Kuswandi (2010) berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan warga negara sebagai individu, maka konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Idealnya, budaya politik ini dalam suatu derajat yang sangat tinggi dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.

Gambar 1. Hasil Uji Deskriptif Variabel Perilaku Politik Uang

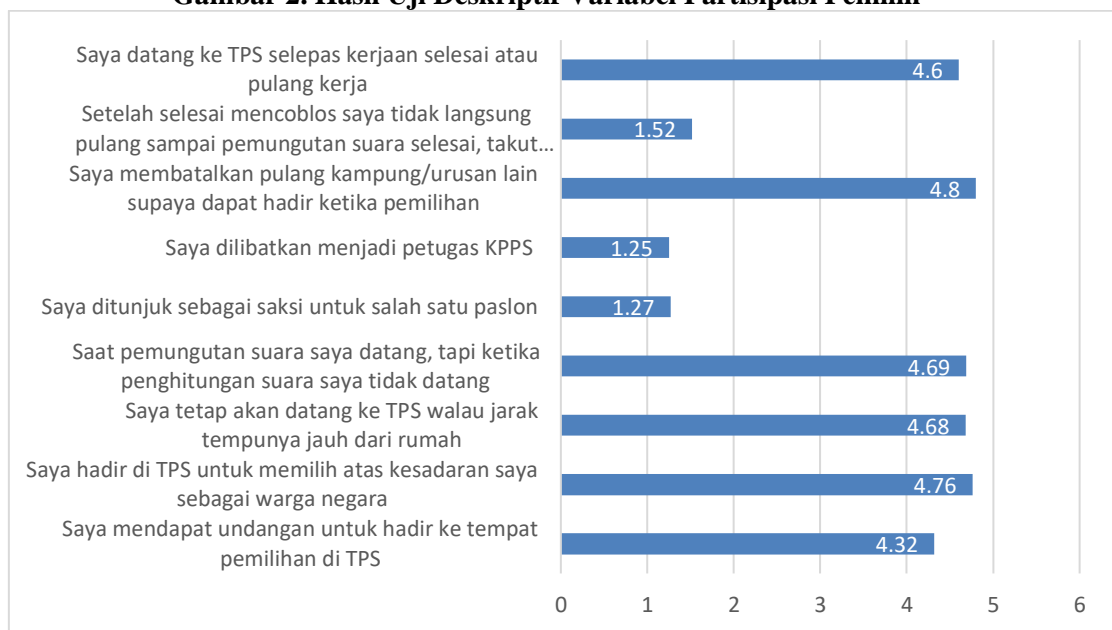


Sumber: Data Diolah dari SPSS.

Gambar 2 menunjukkan hasil deskriptif variable partisipasi pemilih yang terdiri dari 9 item pernyataan. Terdapat 4 item yang memiliki nilai rata-rata (mean) paling tinggi yaitu *Saya membatalkan pulang kampung/urusan lain supaya dapat hadir ketika pemilihan* (mean=4,80), *Saya hadir di TPS untuk memilih atas kesadaran saya sebagai warga negara* (mean=4,76), *Saat pemungutan suara saya datang, tapi ketika penghitungan suara saya tidak datang* (mean=4,69) dan *Saya tetap akan datang ke TPS walau jarak tempunya jauh dari rumah* (mean=4,68).

Jawaban responden menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hak suara sebagai warga negara yang baik. Jarak tempuh, urusan pekerjaan bisa mereka kesampingkan demi untuk bisa datang mencoblos di TPS.

Gambar 2. Hasil Uji Deskriptif Variabel Partisipasi Pemilih



Sumber: Data Diolah dari SPSS.

Gambar 3. Hasil Uji Korelasi Product Moment

		Correlations	
		Perilaku Politik Uang	Partisipasi Pemilih
Perilaku Politik Uang	Pearson Correlation	1	-.075
	Sig. (2-tailed)		.463
	N	97	97
Partisipasi Pemilih	Pearson Correlation	-.075	1
	Sig. (2-tailed)	.463	
	N	97	97

Sumber: Data Diolah dari SPSS.

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa hasil uji korelasi antara variable perilaku politik uang (variabel bebas) dengan partisipasi pemilih (variabel terikat) menggunakan uji korelasi *product moment*, dimana nilai Pearson Correlation $-0,075$ dan nilai Sig.(2-tailed)= $0,463$. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih. Apapun yang dibagikan oleh calon kepala daerah Bersama tim pemenangannya tidak meningkatkan atau menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Walaupun uang/ barang yang dibagikan kepada masyarakat tidak mereka tolak, tetapi mereka datang ke TPS untuk mencoblos bukan karena pemberian uang/barang tetapi karena kesadaran politik. Pertanyaannya adalah apakah mereka memilih calon yang telah memberikan uang/barang kepada mereka?.

Pada tahun 2019 yang lalu, penulis pernah melakukan kajian mengenai perilaku politik uang. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat akan tetap menerima siapapun yang memberi, tetapi Ketika di TPS mereka tetap memilih sesuai dengan hati Nurani bukan memilih calon yang telah memberikan sesuatu kepada mereka. Apabila dianalisis lebih mendalam terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penulis yaitu:

- a. Perilaku politik uang adalah indikasi kelemahan bahkan kegagalan demokrasi
- b. Akbiat biaya politik yang mahal akan menjadi penghalang terpilihnya pemimpin yang ideal
- c. Kemiskinan di masyarakat akan terus dipelihara (agar tetap miskin) supaya suara mereka bisa dibayar ketika masa pemilu/pilkada

SIMPULAN

Usaha meningkatkan partisipasi politik bukanlah dengan membagikan uang atau barang. Berikan masyarakat Pendidikan politik, cara yang baik berpolitik, adab sebagai warga negara dan memberikan semangat berjuang memajukan bangsa melalui terlibat dalam kegiatan politik. Perilaku politik uang, ini adalah virus yang lebih berbahaya daripada Covid-19. Keserakahan ingin berkuasa menyebabkan buta mata dan buta hati sehingga segala macam cara digunakan agar mendapat suara mayoritas. Sistem demokrasi perlu ditinjau ulang, para penyelenggara harus diawasi dengan ketat sehingga ruang untuk mereka berkhianat segera ditutup. Jangan sampai keinginan baik pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum malah menghancurkan sendi kehidupan berbangsa akibat perilaku kejahatan dalam proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Aos Kuswandi. 2010. Membangun Gerakan Budaya Politik Dalam Sistem Politik Indonesia. *Governance*, 1(1): 40-50
- Asfar, M. (2004). *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Utama.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. 333.
- Akbar, Andi. (2016). Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumpa. *Ilmu Politik*, 8-9.
- Burhanudin Muhtadi (2019). Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Pasca Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1): 55-74
- Elfi Yulistyowati, E. P. (2016). Penerapan Konsdep Trias Politica Dalam Sitem Pemerintah Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Dinamika Sosial Budaya*, 330.
- Fadli, A. M. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Gaffar, Afan. 2005. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Ghalia. Indonesia, Bogor, 2002
- Hendrik, Doni. 2010. Variabel Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Demokrasi*, 9(2): 137-148.
- Hepi Riza Zen. 2015. Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. *Jurnal Al-Adalah*, 12(3): 525-540
- Ismawan, I. (1999). *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressido.
- Juliansyah, E. (2007). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Mas'oeed Mochtar dan Colin Mac Andrew. 2011. Perbandingan Sistem Politik Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M. (2012). Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Di Indonesia. *El-Riyasah*, 3(1):1-10.
- Masri Singarimbun, S. E. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Muhammad, M. (2015). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Samudra
- Polancik, G. (2009). *Emperical Research Method Poster*. Jakarta.
- Sekaran, U. (1992). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. John Willey & Sons. New York.
- Syafira, Ayu, dkk. *Sitem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Sinabariba, R. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarkat Pada Pilkada 2018 Di Tpanuli Utara. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23-24.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018) . *Kuantitatif*. Metode Cetakan Bandung: Alfabeta. Penelitian ke-satu.
- Sugiono. (2021, September Senin). Pengaruh Politik Uang. (B. Syafriza, Interviewer)
- Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik. In M. I. Politik, *Ramlan Surbakti* (p. 130). Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Widya Sarana
- Wismabrata, M. H. (2019, April Minggu). *Kasus Politik Uang Jelang Pemilu*.
- Winartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta.